



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

b. bahwa untuk melakukan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- :1. Undang -undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 );
5. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 516, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1190);
7. Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab. Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

dan

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA TENTANG RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK PETA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kolaka dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka;

7. Lembaga Tekhnis adalah Lembaga Tekhnis Kabupaten Kolaka;
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, fasilitas, atau Kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan;
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin Tertentu yang Khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan Kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya Jumlah Retribusi yang Terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB dalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya JumlahRetribusi yang Terutang, jumlah Kredit Retribusi, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, besarnya Sanksi Administrasidan Jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan

- Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah dibayarkan;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi Biaya dan atau Denda.
  15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serata mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan Peta oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Penyediaan dan atau Cetak Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Jasa Umum.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekuensi pencetakan, Jenis dan bahan pencetakan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis pelayanan percetakan, ukuran, serta bahan cetakan yang digunakan

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Kolaka.

### **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 12**

- (1) Masa Retribusi adalah sekali dalam per lembar hasil cetakan
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD

### **BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait yang pemberian pelayanan Penyediaan dan atau Cetak Peta;
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau Bendahara Penerima Pembantu pada SKPD yang bersangkutan
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

### **BAB X PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1 (hari) Kerja;
- (3) Bentuk, Isi, kualitas dan ukuran buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan keringan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran;
- (2) Pemberian keringanan pembayran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

### **BAB XIII KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabilawajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.

#### **Pasal 21**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

### **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

#### **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten Kolaka yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV PEMANFAATAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XVI PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 32**

Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau Denda Setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi Terutang.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 5 September 2014



Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 5 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA,**

**H. POITU MURTOPO.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014  
NOMOR 14  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 14  
TAHUN 2014

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 14 TAHUN 2014**

**TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2014**

**TENTANG : RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
PETA**

Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut:

**I. Keperluan Umum:**

a. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS)

:

- Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 250.000,00/lembar
- Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 200.000,00/lembar
- Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp. 150.000,00/lembar
- Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 100.000,00/lembar
- Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 75.000,00/lembar

b. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) :

- Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 300.000,00/lembar
- Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 250.000,00/lembar
- Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp. 200.000,00/lembar
- Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 150.000,00/lembar
- Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 100.000,00/lembar

c. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Glossy paper:

- Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 350.000,00/lembar
- Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 300.000,00/lembar
- Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp. 250.000,00/lembar
- Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 200.000,00/lembar
- Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 150.000,00/lembar

d. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Glossy paper :

- Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp. 450.000,00/lembar
- Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp. 400.000,00/lembar
- Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp. 350.000,00/lembar
- Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 300.000,00/lembar
- Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 250.000,00/lembar

e. Cetak Digitasi Peta :

- Ukuran Peta Topografi/Rupa Bumi  
(60 x 60 Cm) Minimal 5 Layer Rp. 350.000,00/file
- Tambahan perlayer Rp. 50.000,00/file
- Editing peta yang sudah ada Rp. 50.000,00/file

**II. Keperluan Persyaratan Kelengkapan Dokumen Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):**

- a. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Glossy papper :
  - Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 50.000,00/lembar
  - Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 30.000,00/lembar
  
- b. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) :
  - Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 30.000,00/lembar
  - Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 15.000,00/lembar
  
- c. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) :
  - Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp. 10.000,00/lembar
  - Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp. 5.000,00/lembar

**BUPATI KOLAKA,**

**H. AHMAD SAFEI**